

PENGARUH *LEVERAGE*, PROFITABILITAS DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2020



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi

Oleh :
Rachmaditta Leksono
2015130163

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI
Terakreditasi BAN-PT No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2021

***THE INFLUENCE OF LEVERAGE, PROFITABILITY AND CORPORATE
GOVERNANCE ON TAX AVOIDANCE ON FOOD AND BEVERAGE
COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE FOR
THE YEAR 2016-2020***



UNDERGRADUATE THESIS

*Submitted to complete part of the requirements for
Bachelor's Degree in Accounting*

By :
Rachmaditta Leksono
2015130163

***PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
PROGRAM IN ACCOUNTING
Accredited by National Accreditation Agency
No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2021***

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI



PENGARUH *LEVERAGE*, PROFITABILITAS DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2020

Oleh :

Rachmaditta Leksono

2015130163

PERSETUJUAN SKRIPSI

Bandung, Agustus 2021

Ketua Program Sarjana Akuntansi,

Felisia SE., AMA., M.Ak., CMA

Pembimbing Skripsi,

Monica Paramita Ratna Putri Dewanti, S.E., M.Ak

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama : Rachmaditta Leksono
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 17 Oktober 1997
NPM : 2015130163
Program studi : Akuntansi
Jenis Naskah : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGARUH *LEVERAGE*, PROFITABILITAS DAN *CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR
MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
PERIODE 2016-2020

Yang telah diselesaikan di bawah bimbingan: Monica Paramita Ratna Putri Dewanti,
S.E., M.Ak.

Adalah benar-benar karyatulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (Plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
Pasal 70 Lulusan yang karya ilmiah yang dipublikasikannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagai mana dirinci dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : Juli 2021

Pembuat pernyataan :



(Rachmaditta Leksono)

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu tolak ukur bagi perkembangan suatu negara, pembangunan ini memerlukan dana yang cukup besar. Pendapatan APBN yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur diperoleh dari tiga sumber, salah satunya adalah penerimaan pajak. Penerimaan pajak di Indonesia dinilai tidak dapat memenuhi target dari tahun ke tahun, hal ini diindikasikan oleh ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Salah satu ketidakpatuhan tersebut adalah dengan melakukan praktik penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak tidak hanya dilakukan oleh orang pribadi namun juga oleh perusahaan. Hal ini mengakibatkan Indonesia tidak mencapai target pajak yang sudah ditetapkan.

Faktor-faktor yang membuat perusahaan melakukan kecenderungan praktik penghindaran pajak adalah *leverage*, profitabilitas, serta *corporate governance*. *Leverage* yang dapat diukur dengan DER, merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Perusahaan dapat mengatur tingkat *leverage* perusahaan, semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan maka akan semakin rendah pajak yang akan mereka keluarkan. Profitabilitas yang dapat diukur dengan ROA juga menjadi salah satu faktor dalam penghindaran pajak. Semakin tinggi profitabilitas maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak. *Corporate governance* menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Komisaris independen serta kepemilikan institusional merupakan alat yang dapat digunakan untuk memonitor kegiatan dalam perusahaan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini *hypothetico deductive*. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, data yang digunakan berupa laporan keuangan dari tahun 2016-2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Objek penelitian yang diteliti adalah *leverage*, profitabilitas, komisaris independen, dan kepemilikan institusional. Unit penelitian dalam penelitian ini ialah perusahaan di Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Populasi dalam penelitian ini adalah 34 perusahaan, teknik sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan jumlah sampel yang didapatkan sebesar 11 perusahaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, 2) profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, 3) komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak, 4) kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak, serta 5) *leverage*, profitabilitas, komisaris independen, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara simultan sebesar 13,4%. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat saran yang diberikan antara lain: 1) Pemerintah disarankan meninjau kembali peraturan perpajakan yang ada, terlebih lagi untuk mempertimbangkan hal detail terkait-*implementasi good corporate governance* perusahaan, 2) Wajib pajak badan diharapkan agar lebih aktif dalam mencari informasi terkait dengan perpajakan sehingga diharapkan tidak melakukan kecenderungan untuk melakukan praktik penghindaran pajak 3) Penelitian selanjutnya disarankan untuk mencari faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, menambah jumlah periode penelitian, serta mengganti sektor perusahaan yang diteliti.

Kata Kunci : *corporate governance*, *leverage*, profitabilitas, penghindaran pajak

ABSTRACT

Infrastructure development is one of the benchmarks for the development of a country, this development requires substantial funds. State budget revenues used to finance infrastructure development are obtained from three sources, one of which is tax revenue. Tax revenue in Indonesia is considered unable to meet the target from year to year, this is indicated by the non-compliance of taxpayers in fulfilling their obligations. One of the non-compliance is to practice tax avoidance. The practice of tax avoidance is not only carried out by individuals but also companies. This resulted in Indonesia not achieving the tax target has been set.

The Factors that make companies tend to practice tax avoidance are leverage, profitability, and corporate governance. Leverage, which can be measured by DER is one of the factors that can affected tax avoidance practice. Companies can adjust their level of leverage, the higher leverage level, the lower the tax they will spend. Profitability which can be measured by ROA is also a factor in tax avoidance. The higher level of profitability. The lower the level of tax avoidance. Corporate governance is one of the factors that influence tax avoidance. Independent commissioners and institutional ownership are tools that can be used to monitor activities within the company.

The research method used in this study use is hypothetic-deductive. The data sources used in this research are financial reports from 2016-2020. The data collection technique used is literature study. The object of this research is leverage, profitability, independent commissioner, institutional ownership. The research unit in this study is a Company in The Food and Beverage Sub-Sector listed on Indonesia Stock Exchange period 2016-2020. Population in this study were 34 companies, the sample technique used was purposive sampling with a total sampel of 11 companies.

The results of this study indicate that 1) leverage has no effect on tax avoidance, 2) profitability has no effect on tax avoidance, 3) independent commissioners affect tax avoidance, 4) institutional ownership affects tax avoidance, and 5) leverage, profitability, commissioners independent, and institutional ownership have an effect on tax avoidance simultaneously by 13.4%. Based on the results of the study, there are suggestions given, among others: 1) For the government to be able to review the existing tax regulations, moreover to consider the details related to the formation of good corporate governance of the company, 2) for corporate taxpayers it is expected to be more active in seeking information related to taxation so that it is hoped that there will be no tendency to practice tax avoidance 3) for further research, readers who will conduct further research are advised to look for other factors that can affect tax avoidance, it is recommended to increase the number of research periods and replace the sector of the company under study.

Keywords : corporate governance, leverage, profitability, tax avoidance

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas dan *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk Periode 2016-2020)” dengan tepat waktu. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu dan Bapak, selaku orang tua yang selalu mendukung segala keputusan dan jalan yang diambil oleh peneliti dari lahir hingga saat ini, dan selalu tetap mencintai peneliti apapun yang terjadi tanpa kecuali.
2. Ibu Monica Paramita Ratna Putri Dewanti, S.E., M.Ak., selaku dosen pembimbing yang telah setia memberikan masukan, nasihat, menyemangati serta meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing peneliti menyelesaikan penelitian ini.
3. Ibu Dr. Elizabeth Tiur Manurung, M.Si., Ak., selaku dosen wali yang telah membantu peneliti melaksanakan FRS sejak semester pertama hingga akhir.
4. Ibu Felisia SE., AMA., M.Ak., CMA selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada peneliti selama masa perkuliahan.
6. Mohammad Bayu Nugraha, selaku suami dari peneliti yang selalu hadir, menghibur, dan menyemangati setiap harinya saat peneliti sedang kesulitan agar segera menyelesaikan perkuliahan.
7. Mama, Bapa, Ka Dadang, Ka Dewi, selaku keluarga yang selalu mendukung dan membantu peneliti untuk segera menyelesaikan penelitian.

8. Mochamad Pradipto Leksono, selaku kaka dari peneliti yang selalu mendukung hal-hal yang dikerjakan peneliti dan turut serta membantu selama masa perkuliahan.
9. Vayu, Tsamara, dan Fasma selaku teman dekat peneliti yang selalu berusaha mendengar, menghibur dan hadir ketika peneliti sedang bersedih saat mengerjakan penelitian ini.
10. Annisa Putri selaku teman sejak SMP peneliti yang tiada lelah selalu sabar mendengarkan, menemani dan memberikan nasihat untuk segala keluhan kesah peneliti serta membantu peneliti mengerjakan penelitian ini dari awal hingga akhir.
11. Ridwan Setiaryadhi dan Marsa Nauval, selaku sahabat peneliti yang senantiasa hadir dan mendengarkan setiap saat peneliti butuh.
12. Adirahman, Rafinuur, Irsyad, William, selaku teman peneliti yang senantiasa menghibur dengan kelakuannya yang seperti badut saat peneliti putus asa selamamasa perkuliahan hingga kini.
13. Indri, Faza, Zanit, Mimi, Dhika, Amel, Riama, Adit, Bas, Bene, Delin, Temi, Gilang, Fauzan, Owy, Sarah, Aal, Arta, Polisar, Billy, yang telah menemani peneliti selama masa perkuliahan sehingga tidak terasa berat.
14. Semua teman-teman di Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah menemani dan hadir pada masa-masa perkuliahan peneliti.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti meminta maaf apabila ada kesalahan ataupun perkataan yang kurang berkenan. Peneliti juga sangat terbuka dengankritik dan saran yang diberikan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan lebih baik.

Bandung, Juli 2021



Rachmaditta Leksono

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	7
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR RUMUS.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Kegunaan Penelitian.....	7
1.5. Kerangka Pemikiran	8
1.5.1. Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak	9
1.5.2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak.....	10
1.5.3. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak.	10
1.5.4. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak	11
1.5.5. Pengaruh <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak	11
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Pajak	13
2.1.1. Pengertian Pajak.....	13
2.1.2. Sistem Pemungutan Pajak.....	13
2.2. Wajib Pajak	14
2.2.1. Badan.....	15
2.2.2. Tarif Pajak Penghasilan Badan	15
2.3. Rekonsiliasi Fiskal	18
2.3.1. <i>Deductible Expense</i>	18

2.3.2. <i>Nondeductible Expense</i>	20
2.3.3. Penghindaran Pajak	22
2.4. Pembukuan.....	24
2.5. Laporan Keuangan	25
2.5.1. Jenis Laporan Keuangan.....	26
2.5.2. Elemen Laporan Posisi Keuangan	26
2.5.3. Tujuan Analisis Laporan Keuangan	27
2.5.4. Analisis Rasio	27
2.5.5. Analisis Rasio <i>Leverage</i>	28
2.5.6. Analisis Rasio <i>Profitability</i>	29
2.6. <i>Corporate Governance</i>	30
2.7. Penelitian Terdahulu.....	33
BAB 3. METODOLOGI DAN OBJEK PENELITIAN	38
3.1. Metode Penelitian.....	38
3.1.1. Mengembangkan Hipotesis.....	39
3.1.2. Operasional Variabel	40
3.1.3. Teknik Pengumpulan Data	41
3.1.4. Teknik Pengolahan Data.....	42
3.1.4.1. Statistik Deskriptif	42
3.1.4.2. Uji Asumsi Klasik.....	42
3.1.4.3. Uji Hipotesis	44
3.1.4.4. Regresi Linier Berganda.....	47
3.1.5. Menarik Kesimpulan	48
3.2. Objek Penelitian	48
3.2.1. Unit Penelitian.....	48
3.2.2. Populasi	48
3.2.3. Sampel	50
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	52
4.1. Hasil Pengumpulan dan Pembahasan Data.....	52
4.1.1. <i>Leverage</i>	52
4.1.2. Profitabilitas	55
4.1.3. <i>Corporate Governance</i>	58

4.1.3.1. Komisaris Independen.....	58
4.1.3.2. Kepemilikan Institusional.....	59
4.1.4. Penghindaran Pajak	61
4.2. Statistik Deskriptif.....	62
4.3. Uji Asumsi Klasik	65
4.3.1. Uji Normalitas.....	65
4.3.2. Uji Multikolinearitas	68
4.3.3. Uji Autokorelasi.....	69
4.3.4. Uji Heteroskedastisitas	70
4.4. Pengujian Hipotesis	72
4.4.1. Uji t Statistik	72
4.4.2. Uji F Statistik	74
4.4.3. Uji Koefisien Determinasi	75
4.5. Regresi Linier Berganda	76
4.6. Pembahasan Hasil Penelitian	77
4.6.1. Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak	78
4.6.2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak.....	79
4.6.3. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak.	79
4.6.4. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak	80
4.6.5. Pengaruh <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak	80
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	82
5.1. Kesimpulan	82
5.2. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	88
RIWAYAT HIDUP	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. APBN 2015-2020	1
Gambar 1.2. Pertumbuhan Industri Pengolahan	5
Gambar 1.3. Kerangka Pemikiran	12
Gambar 4.1. Histogram Uji Normalitas	67
Gambar 4.2. <i>P-Plot of Regression</i> Uji Normalitas	68
Gambar 4.3. <i>Scatterplot</i> Uji Heteroskedastisitas	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 3.1. Operasional Variabel.....	40
Tabel 3.2. Data Populasi Sub Sektor Makanan dan Minuman.....	49
Tabel 3.3 Sampel Penelitian.....	50
Tabel 3.4 Data Sampel yang Digunakan.....	51
Tabel 4.1. DER Periode 2016-2020.....	53
Tabel 4.2. ROA Periode 2016-2020.....	56
Tabel 4.3. Rasio Komisaris Independen.....	58
Tabel 4.4. Proporsi Kepemilikan Saham Institusional.....	60
Tabel 4.5. <i>Effective Tax Ratio</i> Tahun 2016-2020.....	61
Tabel 4.6. Analisis Data Keseluruhan.....	63
Tabel 4.7. Uji Normalitas.....	66
Tabel 4.8. Uji Multikolinearitas.....	69
Tabel 4.9. Uji Autokorelasi.....	70
Tabel 4.10. Uji Heteroskedastisitas.....	71
Tabel 4.11. Pengujian t Statistik.....	72
Tabel 4.12. Pengujian F Statistik.....	74
Tabel 4.13. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi.....	76

DAFTAR RUMUS

Rumus 2.1. ETR	24
Rumus 2.2. DER.....	28
Rumus 2.3. DER PMK 165.....	29
Rumus 2.4. ROA.....	30
Rumus 2.5. Komisaris Independen	32
Rumus 2.6. Kepemilikan Institusional.....	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Saldo Total Utang Kuartal 2016 (dalam jutaan rupiah)	88
Lampiran 2. Saldo Total Utang Kuartal 2017 (dalam jutaan rupiah)	89
Lampiran 3. Saldo Total Utang Kuartal 2018 (dalam jutaan rupiah)	90
Lampiran 4. Saldo Total Utang Kuartal 2019 (dalam jutaan rupiah)	91
Lampiran 5. Saldo Total Utang Kuartal 2020 (dalam jutaan rupiah)	92
Lampiran 6. Saldo Total Ekuitas Kuartal 2016 (dalam jutaan rupiah)	93
Lampiran 7. Saldo Total Ekuitas Kuartal 2017 (dalam jutaan rupiah)	94
Lampiran 8. Saldo Total Ekuitas Kuartal 2018 (dalam jutaan rupiah)	95
Lampiran 9. Saldo Total Ekuitas Kuartal 2019 (dalam jutaan rupiah)	96
Lampiran 10. Saldo Total Ekuitas Kuartal 2020 (dalam jutaan rupiah)	97
Lampiran 11. Total Laba Bersih Periode 2016-2020 (dalam jutaan rupiah)	98
Lampiran 12. Total Aset Periode 2016-2020 (dalam jutaan rupiah)	99
Lampiran 13. Total Laba Sebelum Pajak Tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah)	100
Lampiran 14. Total Beban Pajak Tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah).....	101
Lampiran 15. Jumlah Komisaris Independen 2016-2020	102
Lampiran 16. Total Anggota Dewan Komisaris 2016-2020	103
Lampiran 17. Total Saham Kepemilikan Institusional 2016-2020.....	104
Lampiran 18. Total Saham Beredar Perusahaan 2016-2020.....	105
Lampiran 19. Tabel t.....	106
Lampiran 20. Tabel F Simultan.....	107

BAB 1

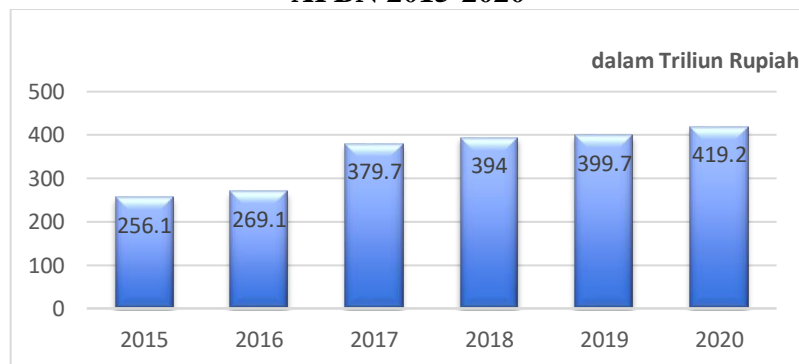
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu tolak ukur bagi perkembangan suatu negara. Pembangunan infrastruktur secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan daya saing sebuah negara. Selain dapat meningkatkan daya saing, pembangunan infrastruktur ini akan memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur tentunya memerlukan dana yang cukup besar. Berdasarkan data yang dilansir dari *website* Kementerian Keuangan anggaran infrastruktur mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2015 hingga 2020 yang dapat dilihat pada Gambar 1.1. Anggaran yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Gambar 1.1.
APBN 2015-2020



Sumber : APBN 2020 yang telah diolah

Pendapatan APBN yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur diperoleh dari tiga sumber, yaitu : penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Pendapatan terbesar APBN berasal dari penerimaan pajak. Berdasarkan data APBN yang dilansir dari *website* Kementerian Keuangan pada tahun 2020 pendapatan negara adalah sebesar 1.699,9 triliun Rupiah, sementara anggaran pendapatan terbesarnya berasal dari penerimaan pajak yaitu sebesar 1.404,5 triliun Rupiah. Menyadari besarnya kontribusi pajak bagi

pendapatan, maka Direktorat Jendral Pajak (DJP) mulai mengoptimalkan sistem penerimaan pajak.

Terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak yaitu : *self assessment*, *official assessment system*, dan *withholding system*. Pemungutan pajak dengan sistem *self assessment* memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Namun pada praktiknya, sistem *self assessment* ini memiliki kelemahan yaitu memungkinkan terjadinya penghindaran pajak. Hal ini dapat mengakibatkan Indonesia kehilangan penerimaan pajak dalam jumlah besar. Penghindaran pajak merupakan tindakan menghindari pajak, metode dan teknik yang dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam ketentuan perpajakan, sehingga tidak melanggar dan menentang ketentuan yang berlaku (Pohan, 2016:23).

Kehilangan potensi penerimaan pajak di Indonesia telah ditaksir oleh *Tax Justice Network*, menurut laporan dari *Tax Justice Network* yang dilansir dari laman portal berita Kontan menyebutkan bahwa Indonesia pada tahun 2020 akan merugi sebesar US\$4,86 akibat penghindaran pajak korporasi maupun orang pribadi. Selain itu juga, Indonesia selama beberapa tahun terakhir tidak dapat mencapai target dalam penerimaan pajak. Berdasarkan data dari laman Kementerian Keuangan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 hanya mencapai 84,4% dari target kemudian pada tahun 2018 mencapai 89,7% dan pada tahun 2017 mencapai 92,4%.

Penghindaran pajak ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tingkat *leverage*. Menurut Nugraha dalam Barli (2018) utang dapat menyebabkan ada beban bunga yang timbul dari utang yang dimiliki oleh perusahaan. Besar kecilnya *leverage* pada perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan. Biaya beban bunga dari utang dapat dikurangkan dalam menghitung beban pajak sehingga beban pajak menjadi lebih kecil. Melihat bahwa *leverage* ini dapat menjadi celah untuk dapat melakukan penghindaran pajak, maka pemerintah Indonesia mengatur leverage dengan menggunakan rasio *debt to equity ratio* (DER). Tindakan pencegahan yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan PMK-169/PMK.010.2015 yang mengatur tingkat rasio *debt equity to ratio* (DER) maksimal sebesar 4:1.

Selain itu juga leverage menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran, hal ini terlihat dari beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* yang diukur dengan DER memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut Purwanto dalam Hidayat dan Fitria (2018) menerangkan bahwa perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi maka tingkat agresivitas pajak perusahaan tinggi, sebaliknya jika *leverage* rendah maka otomatis agresivitas pajaknya juga akan rendah. Menurut Ekaputra dan Widayari (2019) bahwa DER sebagai *proxy* dalam perhitungan *leverage* sebuah perusahaan dapat menunjukkan rasio antara utang dan ekuitas, semakin tinggi DER maka akan menunjukkan bahwa utang lebih besar dari pada ekuitas yang berarti beban hutang perusahaan besar maka secara tidak langsung akan mengurangi tingkat laba perusahaan itu sendiri. Hal ini dikarenakan utang akan menimbulkan beban bunga yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajak. Berdasarkan hasil penelitian dari Putriningsih et.al (2018) dan Indah (2020) menyatakan bahwa *leverage* ini memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini juga diperkuat oleh Kovermann dan Velte (2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa salah satu yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *leverage*. Namun berbeda dengan hasil penelitian dari Yohan dan Pradipta (2019) dimana menemukan bahwa *leverage* ini tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil dari penelitian Hidayat (2018) juga menemukan bahwa penghindaran pajak ini tidak dipengaruhi oleh *leverage*. Ketidakkonsistenan dari hasil penelitian ini menjadi acuan untuk lebih menggali lebih lanjut apakah terdapat pengaruh atau tidak *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Tidak hanya *leverage* yang dapat menjadi indikasi perusahaan dalam penghindaran pajak, profitabilitas juga yang diukur dengan *return on assets* (ROA) dapat menjadi faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Penggunaan ROA dalam mengukur tingkat profitabilitas perusahaan dengan membandingkan pendapatan bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi ROA maka akan semakin tinggi juga pendapatan yang diperoleh perusahaan, begitu juga sebaliknya jika ROA kecil maka akan semakin rendah pendapatannya. Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan cara mengurangi pendapatan bersih yang diterima

perusahaan, sehingga beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan juga semakin kecil. Berdasarkan beberapa hasil penelitian bahwa faktor ini menjadi pengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut Hidayat (2018), Indah (2020) serta Yohan dan Pradipta (2019) yang melaksanakan penelitian di Indonesia menyebutkan bahwa profitabilitas ini memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Namun dalam penelitian Murnawingtyas (2019) serta Ekaputra dan Widyasari (2019) menemukan bahwa profitabilitas ini tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini pun menjadi dasar dilakukan penelitian mengenai pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

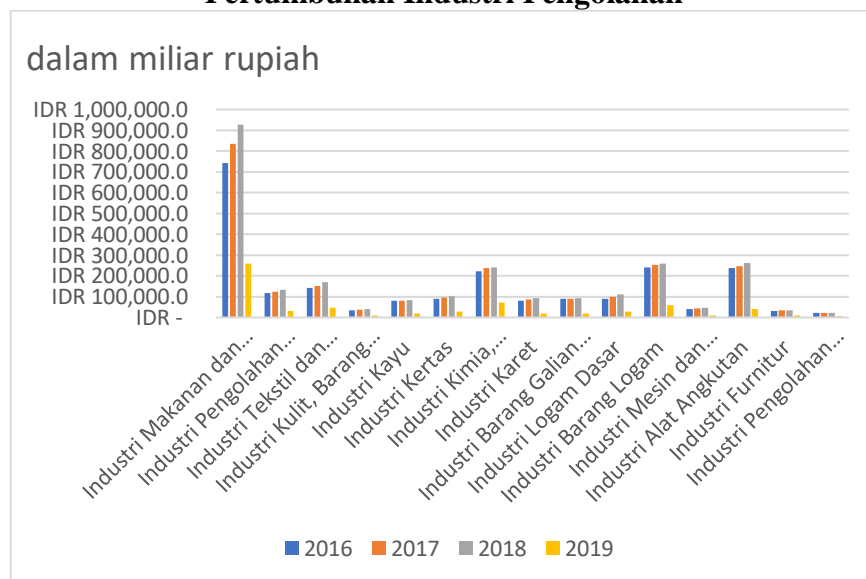
Kecenderungan dalam praktik penghindaran pajak ini tidak luput dari peran internal perusahaan. Perusahaan dapat mengelola beban perpajakan dengan baik agar bisa mendapatkan laba yang optimal, beban pajak yang rendah secara langsung akan meningkatkan laba. Pemerintah sendiri selalu menekankan kepada setiap perusahaan agar memiliki *good corporate governance* sehingga mereka akan menjauhi praktik penghindaran pajak. Menurut Widiiswa dan Baskoro (2020) bahwa dengan kehadiran dewan komisaris yang bersifat independen pada jajaran dewan komisaris menyebabkan pengawasan terhadap jalannya perusahaan dapat dilakukan lebih akuntabel. Adanya pengawasan dari elemen *coprorate governance* salah satunya adalah komisaris independen menjadikan perusahaan lebih berhati-hati lagi dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

Corporate governance ini menjadi salah satu faktor dalam kecenderungan penghindaran pajak, hal tersebut telah diteliti oleh beberapa peneliti seperti Andriyani dan Mahpudin (2021) yang menyatakan bahwa *corporate governance* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Kemudian Sumantri et.al (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa *corporate governance* ini memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan di luar Indonesia pun menyebutkan hal yang sama, seperti hasil penelitian dari Koeverman dan Velte (2019) mengungkapkan bahwa penghindaran pajak memiliki kaitan erat dengan *corporate governance*. Namun dalam penelitian lainnya *corporate governance* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak seperti hasil penelitian oleh Putriningsih et al (2018) yang mengungkapkan bahwa *corporate*

governance pada perusahaan sektor perbankan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar dibandingkan sektor lainnya di Indonesia. Menurut berita yang dilansir dari laman DDTC (2020, 20 Februari), Menteri keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa hingga akhir Januari 2020 sektor pajak sektor usaha industri pengolahan mencapai Rp 28,9 triliun, jumlah ini menjadikan sektor manufaktur menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak dengan porsi 28,1% dari total penerimaan yang dikumpulkan Ditjen Pajak. Sektor industri pengolahan atau manufaktur memiliki berbagai jenis lapangan usaha, salah satunya sub sektor makanan dan minuman Berdasarkan laporan BPS 2020 yang dilansir dari laman BPS (2020, 16 Oktober) tahun 2016 hingga tahun 2020 industri makanan dan minuman ini mengalami peningkatan serta tertinggi dari sektor-sektor lainnya dalam industri pengolahan. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2.
Pertumbuhan Industri Pengolahan



Sumber : BPS yang telah diolah

Pertumbuhan industri makanan dan minuman ini tidak lepas dari kebutuhan masyarakat Indonesia akan konsumsi yang semakin besar setiap tahun. Perkembangan perusahaan-perusahaan ini sangat stabil dan permintaan terhadap produk mengikuti perkembangan jumlah masyarakat. Kebutuhan masyarakat terhadap produk makanan dan minuman siap santap mengakibatkan usaha makanan

dan minuman terus berkembang dengan pesat. Inilah yang menyebabkan perusahaan makanan dan minuman lebih stabil dibandingkan dengan perusahaan yang berada di sektor lain, karena meskipun keadaan ekonomi tidak stabil, masyarakat akan tetap mengkonsumsi makanan dan minuman.

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat ketidakkonsistenan dari beberapa hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah variabel *leverage*, profitabilitas, dan *corporate governance* dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh *leverage* perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
2. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
3. Apakah terdapat pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
4. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
5. Apakah terdapat pengaruh *leverage*, profitabilitas, komisaris independen dan kepemilikan institusional perusahaan secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh *leverage* perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
2. Mengetahui pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
3. Mengetahui pengaruh komisaris independen perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
4. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
5. Mengetahui pengaruh *leverage*, profitabilitas, komisaris independen dan kepemilikan institusional perusahaan secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah, khususnya Direktorat Jendral Pajak agar lebih mengawasi pelaksanaan kewajiban pajak perusahaan, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pemerintah mengenai pengaruh *leverage*, profitabilitas, dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Diharapkan penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam penyusunan berbagai regulasi perpajakan.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca terkait penghindaran pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa.

1.5. Kerangka Pemikiran

Penghindaran pajak merupakan sebuah masalah yang dapat menyebabkan kerugian bagi Indonesia jika tidak diminimalisir. Kepatuhan bagi wajib pajak baik dari perusahaan maupun dari orang pribadi sangat dibutuhkan, mengingat bahwa Indonesia menggunakan sistem *self assessment* dalam perhitungan pajak. Penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia dapat terindikasi dari tidak tercapainya target dari penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2017 mencapai 92,4% kemudian pada tahun 2018 menurun hingga sebesar 89,7% dan pada tahun 2019 terjadi penurunan hingga 84,4% dari target. Penghindaran pajak menurut Pohan (2016:23) mendefinisikan sebagai upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak

Menurut Kovermann dan Velte (2020), hamper di seluruh dunia yang menganut sistem *self assessment* memiliki kecenderungan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Celah dalam penggunaan sistem pemungutan pajak dengan sistem *self-assessment* adalah perusahaan dapat memiliki kecenderungan untuk mengoptimalkan *deductible expense* sehingga dapat menurunkan penghasilan kena pajak dan meminimalkan beban pajak penghasilan. Menurut Pohan (2016:23), penghindaran pajak ini dilakukan oleh para wajib pajak karena adanya area abu-abu (*grey area*) pada undang-undang perpajakan untuk dapat mengurangi pajak.

Penelitian ini indikator yang digunakan untuk menganalisa penghindaran pajak adalah *Effective Tax Ratio* (ETR). Menurut Hidayat dan Fitria (2018) dalam penelitian ETR dapat diukur dengan membandingkan total beban pajak penghasilan yang terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan dengan laba sebelum pajak. Menurut Lanis dan Richardson dalam Hidayat dan Fitria (2018) ETR dapat mengidentifikasi adanya agresivitas pajak dalam perusahaan. ETR berbanding terbalik dengan upaya penghindaran pajak. Artinya, semakin tinggi

ETR suatu perusahaan maka semakin rendah upaya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Faktor-faktor yang menjadi celah dalam praktik penghindaran pajak ini telah diteliti dalam beberapa penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, peneliti mengambil tiga faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak diantaranya adalah : variabel *leverage*, profitabilitas dan *corporate governance*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah *leverage*, profitabilitas, dan *corporate governance* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

1.5.1. Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Leverage merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Menurut Putriningsih et.al (2018) dan Indah (2020) menyebutkan perusahaan dapat mengatur tingkat *leverage* mereka agar dapat mengurangi pajak mereka. Semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, maka akan semakin rendah pajak yang akan mereka keluarkan. Hasil penelitian dari Indah (2020) menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Salah satu indikator untuk menghitung tingkat *leverage* ini adalah menggunakan rasio *Debt Equity to Ratio* (DER). Rasio DER dapat menggambarkan rasio hutang perusahaan terhadap ekuitas. Rasio *Debt Equity to Ratio* (DER) yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada PMK No. 169/PMK.010/2015 yang menggunakan perbandingan maksimal proporsi utang terhadap modal sebesar 4:1 atau maksimum rasio DER adalah 4 atau dengan kata lain rasio utangnya 80% dari total modal dengan dasar perhitungan dari rata-rata total utang dan modal. DER yang tinggi mengakibatkan beban pajak penghasilan menjadi rendah sehingga ETR rendah. ETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila DER tinggi maka upaya penghindaran pajak tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah *leverage* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.5.2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayat (2018), Indah (2020), dan Yohan dan Pradipta (2019) menunjukkan bahwa profitabilitas ini memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas dapat mengindikasikan penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan rasio *Return on Asset* (ROA) sebagai indikator untuk mengukur profitabilitas. ROA ini mengukur tingkat pengembalian terhadap aset perusahaan. Rasio ini juga sering disebut sebagai rentabilitas ekonomis merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam mencari ROA rumus yang digunakan adalah dengan membagi pendapatan bersih terhadap total aset. ROA yang tinggi mengakibatkan beban pajak penghasilan yang tinggi, sehingga menyebabkan ETR tinggi. ETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak, dengan kata lain jika ROA tinggi maka upaya penghindaran pajak rendah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.5.3. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Komisaris independen dapat dihitung dengan membandingkan jumlah komite independent dengan jumlah anggota dewan komisaris yang ada di perusahaan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 Pasal 1 mendefinisikan komite independen sebagai anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Menurut Andriyani dan Mahpudin (2021) menyebutkan bahwa komisaris independen berperan dalam pengambilan keputusan pajak strategis pada perusahaan tambang yang ada di Indonesia. Menurut Sumantri *et al.* (2018) dengan adanya dewan komisaris independen yang ada di perusahaan mampu melakukan pengawasan yang cukup ketat terhadap pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini komisaris independen memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.5.4. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional dapat menjadi kontrol dari pihak eksternal terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Andriyani dan Mahpudin (2021) semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan, begitu juga sebaliknya. Ketika kepemilikan institusional turun maka penghindaran pajak akan mengalami kenaikan. Untuk menghitung jumlah kepemilikan institusional, rumus yang digunakan adalah jumlah kepemilikan institusional dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Selain itu juga berdasarkan hasil penelitian dari Putri dan Putra (2017) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

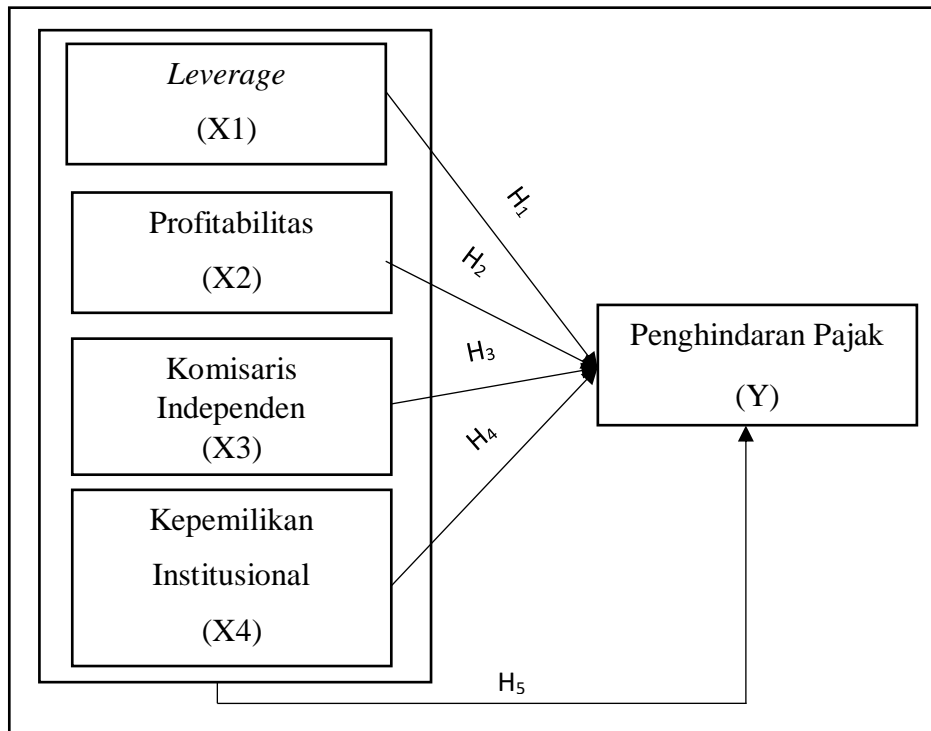
1.5.5. Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan penelitian terdahulu, bahwa *leverage*, profitabilitas dan *corporate governance* ini secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Putra dan Putri (2017) menyebutkan bahwa secara simultan *leverage*, profitabilitas dan *corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara penelitian dari Putriningsih *et al* (2018), Yohan dan Pradipta (2019), Indah (2020) menunjukkan *leverage* dan profitabilitas memiliki pengaruh simultan terhadap penghindaran pajak.

Leverage memegang peranan penting dalam pengurangan beban pajak. Semakin tinggi beban bunga dari hutang maka akan menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, hal ini dapat menjadi celah untuk meningkatkan beban pajak perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan kepada negara menjadi semakin kecil. Profitabilitas pun menjadi salah satu indikasi perusahaan dalam melaksanakan praktik penghindaran pajak, dengan menurunkan pendapatan perusahaan maka akan mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Kemudian komisaris independen serta kepemilikan institusional sebagai pihak internal perusahaan menjadi hal penting dalam menentukan strategi pajak

perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis penelitian ini adalah *leverage*, profitabilitas, komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak.

Gambar 1.3.
Kerangka Pemikiran



Sumber : data diolah oleh penulis